

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

Gusti Haryati

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi

Email: gustiharyati31@gmail.com

Submitted:05-09-2022, Reviewer: 09-10-2022, Accepted: 07-11-2022

ABSTRAK

Dalam rangka menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030, pemerintah melalui Kementerian PPPA menyelenggarakan evaluasi KLA setiap tahunnya. Terdapat kelemahan-kelemahan Kota Bukittinggi dalam capaian indikator KLA pada tahun 2022 sehingga meraih peringkat nindya. Berdasarkan hal di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian indikator evaluasi KLA Bukittinggi tahun 2022. Penelitian ini merupakan mix method study dengan desain penelitian sequential explanatory dengan sampel dan informannya adalah tim Gugus Tugas KLA Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis capaian indikator KLA Kota Bukittinggi yang terdiri dari substansi kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak. Pengumpulan data diperoleh dari data evaluasi mandiri KLA Kota dan dengan melakukan wawancara mendalam pada informan, triangulasi dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi pada bulan April s/d Agustus 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian indikator KLA Kota Bukittinggi berdasarkan evaluasi mandiri adalah 985,5 (peringkat KLA). Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam evaluasi mandiri. Hasil ini sejalan dengan hasil evaluasi KLA Kementrian PPA sebesar 702 (peringkat Nindya). Berdasarkan hasil analisa SWOT dapat diperoleh faktor-faktor internal yang dimiliki Kota Bukittinggi adalah regulasi yang jelas, komitmen, sumberdana, sumberdaya manusia dan kemitraan serta keterlibatan forum anak. Begitu juga dengan faktor eksternalnya seperti amanat nasional dan internasional, era globalisasi, kemajuan iptek dan pandemi covid-19. Oleh karena itu penting diciptakan rencana strategi Kota Bukittinggi wujudkan Kota Layak Anak tahun 2023.

Kata Kunci: *Capaian, Indikator, KLA, Bukittinggi*

ABSTRACT

In order to achieve Child-friendly Indonesia (IDOLA) in 2030, the government through the Ministry of PPPA conducts an annual KLA evaluation. There are some weaknesses in the KLA indicator achievement of Bukittinggi in 2022 so that it achieves the nindya rating. Based on the explained above, this study aims to analyze the achievement of the KLA indicator evaluation of Bukittinggi in 2022. This research is a mix method study with a sequential explanatory research design, with the sample and informants are the KLA Task Force team of Bukittinggi. This research was conducted by analyzing the KLA indicator achievement of Bukittinggi which consists of institutional substance and 5 (five) Clusters of Child Rights. Data collection was obtained from KLA self-evaluation data and by conducting in-depth interviews with informants, triangulation and document review conducted at the P3APPKB of Bukittinggi Office from April to August 2022. The results of quantitative research indicates that based on self-evaluation, the achievement of the KLA indicator in Bukittinggi is 985.5 (KLA rating). The results of the qualitative research shows that there are weaknesses in self-evaluation. This result is in line with KLA evaluation based on the Ministry of PPA results of the of KLA indicator in Bukittinggi which is 702 in score (Nindya rank). Based on the SWOT analysis results, it can be seen that the internal factors owned by the City of Bukittinggi are clear regulations, commitments, sources of funds, human resources and partnerships as well as the involvement of children's forums. Likewise with

external factors such as national and international mandates. the era of globalization, advances in science and technology and the covid-19 pandemic. So that there were four alternative groups of strategy for Bukittinggi to achieve KLA. Therefore, it is important to create a strategic plan for Bukittinggi to create a Child Friendly City in 2023.

Keywords: Achievement, Indicators, KLA, Bukittinggi

PENDAHULUAN

Unicef telah merumuskan Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on The Right of The child (CRC) sebagai wujud penting dalam pemenuhan hak anak. Setiap negara yang sudah meratifikasi KHA mempunyai kewajiban untuk berkomitmen melindungi hak anak. Pemenuhan hak anak merupakan amanah nasional dan internasional. Dinama anak di masa sekarang merupakan generasi penerus bangsa pada saat 2045 yang nantinya merupakan periode emas usia produktif yang menentukan eksistensi bangsa. Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. (Unicef, 2020)

Pemerintah Indonesia meratifikasi CRC/KHA dan menerapkannya dalam Kebijakan Kota Layak Anak hal ini diikuti dengan beberapa landasan hukum penyelenggaraan KLA yang ada di Indonesia. sejalan dengan pasal 21 ayat(4) dan ayat 95) undang-undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan anak melalui program KLA mulai dari tingkat nasional sampai ke desa dan kelurahan yang ada. (RI K. , 2014). Kementerian PPA menyelenggarakan evaluasi KLA pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030 yang dilaksanakan setiap tahun sekali. (PPA, 2022).

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA yang kegiatannya secara bertingkat mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional yang terdiri dari 6 (enam) substansi yakni substansi kelembagaan

dan substansi 5 (lima) Hak anak yang terdiri dari Klaster I : hak Sipil Anak dan kebebasan, Klster II: Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan, Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya dan Klster V: Perlindungan Khusus. (RI, 2022)

Kota Bukittinggi berpeluang besar untuk mewujudkan KLA, yang mana sejak dicanangkannya sebagai Kota Layak Anak erdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak. Sampai saat ini penghargaan yang sudah diterima Kota bukittinggi adalah 3 kali pratama 2 kali madya dan 1 kali nindya pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi mandiri jumlah nilai yang terakomodir 985,5 (peringkat KLa) sementara hari dari verifikasi Hybrid dan evaluasi Kementeriann PPA nilai yang terakomodir 702 (peringkat nindya). Adapun penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis capaian indikator evaluasi KLA Kota Bukittinggi Tahun 2022. Dengan demikian didapatkan isusun rekomendasi strategi Kota Bukittinggi mewujudkan KLA Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method study* (penelitian metode campuran) yang bersifat observasional. Desain penelitian ini menggunakan *Sequential Explanatory* yang mana pada tahap pertama peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif untuk mengidentifikasi kondisi pemenuhan hak anak melalui capaian indikator Kota Layak Anak yang terdiri dari aspek kelembagaan dan aspek 5 klaster hak anak di Kota Bukittinggi dengan memakai metode observasi pada aplikasi nasional evaluasi Kota Layak Anak. Selanjutnya pada tahap kedua melakukan pengumpulan data dan menganalisis data kualitatif guna mendapatkan informasi yang

lebih komprehensif dan memperkuat hasil penelitian kuantitatif dengan melakukan wawancara mendalam, melakukan triangulasi dan telaah dokumen terhadap Tim Gugus Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi untuk kemudian dianalisis, dideskripsikan, dan diinterpretasikan serta dilakukan analisa SWOT untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal implementasi KLA sebagai dasar penyusunan rekomendasi Strategi Kota Bukittinggi Wujudkan Kota Layak Anak tahun 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian indikator KLA Kota Bukittinggi berdasarkan evaluasi mandiri adalah 985,5 (peringkat KLA) yang mana 4 substansi penilaian evaluasi KLA Kota Bukittinggi tahun 2022 memenuhi target/ nilai maksimal yakni substansi kelembagaan. Klaster I : Hak Sipil dan kebebasan, Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster V : Perlindungan khusus. Sementara untuk capaian indikator KLA yang tidak memenuhi target /nilai maksimal adalah Klaster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan dan klaster IV : Pendidikan , pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sementara hasil dari penelitian kualitatif menunjukkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam evaluasi mandiri sehingga dapat dianggap data tidak valid dan memungkinkan terjadi pengurangan nilai. Dan hasil ini sejalan dengan hasil evaluasi KLA kementerian PPA sebesar 702 (peringkat Nindya). Hasil Analisa SWOT menunjukkan KLA Bukittinggi perlu disusun Strategi Kota bukittinggi wujudkan Kota Layak Anak Tahun 2023 dengan mempertimbangkan analisis faktor internal dan eksternal.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan KLA tahun 2022 adalah tidak memadainya ketersediaan anggaran, regulasi dan Sumberdaya manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan KLA kita berhadapan dengan faktor penghalang berupa biaya, regulasi dan SDM.(Annisa & Alhadi, 2019)(Darmayanti, 2019; Dr. Ir. Mahditia

Paramita, 2016; Nurhayati et al., 2018; Pemerintah RI, 2021; Rachman, 2018; Ratnasari, 2020; Roza & Arliman, 2018). Disamping itu juga terdapat kelemahan berupa belum optimalnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD lintas sektor, instansi vertikal dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa secara kelembagaan OPD masih bersifat egosektoral, dan belum optimalnya kemitraan antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat maupun masyarakat sendiri untuk wujudkan KLA. (Utama, 2019)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan teori terkait kebijakan Kota Layak Anak dapat disimpulkan bahwa Kota bukittinggi berpeluang besar untuk wujudkan KLA pada tahun 2023. Pada hasil evaluasi mandiri KLA kota Bukittinggi nilai yang terakomodir 985, (peringkat KLA) namun berdasarkan hasil penelitian terdapat kelemahan-kelemahan dari evaluasi mandiri KLA Kota Bukittinggi yang memungkinkan terjadi pengurangan-pengurangan nilai disebabkan ketersediaan anggaran, Sumberdaya manusia, sarana prasana dan kebijakan serta kelengkapan data dukung dan dokumentasi yang belum terpenuhi, hal ini sejalan dengan hasil evaluasi KLA dari Kementerian PPA dengan nilai yang diakomodir 702 (peringkat nindya). Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat direkomendasikan strategi Kota Bukittinggi untuk wujudkan Kota Layak Anak tahun 2023.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Kepala instansi / SKPD beserta segenap Tim Gugus Tugas yang telah membantu dalam penelitian ini yakni Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Bapelitbang Kota Bukittinggi, Dinas kesehatan Kota Bukittinggi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, Dinas Sosial Kota Bukittinggi dan dan Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.

REFERENSI

UNICEF. (2020). Situasi Anak di Indonesia. *Unicef Indonesia*, 8–38.

- Kemen PPPA RI. (2022). *Juknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*.
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. 2.
- Kemensesneg, R. (2014). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Raden Dewi Setiani. (2018). *Implementasi Kebijakan Pembentukan kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di kabupaten Pandeglang*. 4(1), 1–23.
- UTAMA, M. D. (2020). Peran Pemerintah (Utama.M.D, 2020). *Badati*, 2(1), 69–84. <https://doi.org/10.38012/jb.v2i1.408>
- Annisa, N., & Alhadi, Z. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Ramah Anak Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAAP)*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.21>
- Darmayanti. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera* <http://scholar.unand.ac.id/49730/>
- Dr. Ir. Mahditia Paramita, M. S. (2016). *Dari Surakarta Mendesain Kota layak Anak Indonesia*. carita.
- Nurhayati, Aslinda, A., & Akib, H. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. 2.
- Rachman, T. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Ratnasari, P. (2020). *Strategi Pemerintah Kota Palangkaraya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak*.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.